

**PERAN PEMERINTAH ACEH BESAR DALAM
PENCEGAHAN GENERASI STUNTING DI KECAMATAN
PULO ACEH KABUPATEN ACEH BESAR**

Fikri

Email : doankfikri52@gmail.com

Program Studi Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Institut Teknologi Dan
Kesehatan Tritunas Nasional, Makassar

ABSTRACT

Stunting which is a condition coincident malnutrition since 1000 day of a child's life is still a health problem in Indonesia, ranking second in the world. The causes of stunting include poor parenting, inadequate care, barriers to access to nutrition and clean water. As well as infectious diseases. Stunting prevention plays an important role in tackling the causes of stunting from its roots. One of them is by providing education to cadres about stunting prevention. Training provided to cadres can improve public health from the dissemination of health information. This research wants to see how effective stunting education is in increasing cadre knowledge about stunting prevention. This study used a Systematic Literature Review by systematically searching for studies using the PRISMA protocol on ten national article portals. Two articles were selected to be the main discussion of the research, all of which were studies with a cross-sectional design, with stunting prevention education for cadres. The greatest effectiveness in increasing the knowledge of cadres is through audiovisual media and lecture and discussion methods, namely as much as 70%.

Keywords : Stunting, Stunting Prevention, cadre, Systematic Literature Review

ABSTRAK

Stunting yang merupakan kondisi kekurangan gizi kronis sejak 1000 hari kehidupan seorang anak masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, menduduki peringkat kedua di dunia. Penyebab stunting diantaranya adalah pola asuh yang kurang baik, pelayanan antenatal yang kurang, hambatan akses gizi dan air bersih. Serta penyakit infeksi. Pencegahan stunting memegang peranan penting dalam menanggulangi faktor penyebab stunting dari akarnya. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi kepada kader mengenai pencegahan stunting. Pelatihan yang diberikan kepada kader dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dari diseminasi mengenai informasi kesehatan. Penelitian ini ingin melihat seberapa efektif edukasi kepada stunting dalam meningkatkan pengetahuan kader mengenai pencegahan stunting. Penelitian ini menggunakan Systematic Literature review dengan pencarian studi secara sistematis menggunakan protokol PRISMA pada sepuluh portal artikel nasional. Terpilih dua artikel yang menjadi bahasan utama penelitian, semuanya adalah penelitian dengan desain potong lintang, dengan edukasi pencegahan stunting kepada kader. Efektivitas terbesar dalam peningkatan pengetahuan kader adalah melalui media audiovisual dan metode ceramah serta diskusi yaitu sebanyak 70%.

Kata kunci : Stunting, Pencegahan Stunting, Edukasi, Kader, Systematic Literature Review

PENDAHULUAN

Bila kita mengambil pengertian dari KBBI, *stunting* disebut dengan tengkes yang diartikan kerdil (tidak dapat tumbuh menjadi besar); kecil (jika dibandingkan dengan pasangannya) atau bisa juga diartikan kondisi ketika anak gagal bertumbuh dan berkembang.

Stunting merupakan kondisi pada anak dengan gagal tumbuh atau terlambat bertumbuh karena kekurangan gizi kronis yang dimulai sejak dalam kandungan ibu selama 1000 hari pertama kehidupan hingga usia 23 bulan (baduta) (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018). Penyebab dari stunting adalah pola asuh yang kurang baik, pelayanan *antenatal care* yang kurang kepada ibu, hambatan akses rumah tangga untuk makanan yang bergizi, hambatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta penyakit infeksi yang diderita oleh anak. Selain itu masih terdapat penyebab dari faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik (Carolina, 2021). Kondisi stunting bersifat tidak dapat kembali sehingga upaya signifikan yang dapat dilakukan untuk mencegah kekurangan gizi adalah dengan pencegahan stunting (World Health Organization, 2014).

Secara global pada tahun 2020, sebanyak 149 juta balita di seluruh dunia menderita stunting dan berdampak pada masalah kesehatan lainnya. Data WHO juga menunjukkan bahwa lebih dari setengah balita yang menderita stunting tinggal di Asia dan Afrika. Namun benua Asia hanya memiliki beberapa negara dengan prevalensi stunting di atas 30%, di antaranya yaitu India, Nepal, Laos, dan Indonesia. Indonesia memiliki tingkat stunting dengan kategori sangat tinggi dan dengan progress yang keluar dari jalur (belum mendekati target) (UNICEF, WHO, 2021).

Indonesia memiliki tingkat stunting mencapai 30,8% pada 2018 dan 27,7% pada tahun 2019. Walaupun mengalami penurunan, Indonesia menduduki peringkat 108 dari 132 negara dengan prevalensi stunting terbesar di dunia. Dalam berbagai indikator, pencegahan stunting di Indonesia juga masih mengalami tantangan, diantaranya kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) yang masih meningkat (5,7% pada 2013 dan 6,25% pada 2018), proporsi imunisasi dasar lengkap masih menunjukkan penurunan (59,2% pada 2013 dan 57,9% pada 2018), ibu dan balita dengan kondisi kekurangan energi yang belum mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) masih cukup tinggi (74,8% dan 59%), serta anemia pada ibu hamil yang meningkat (37,1% pada 2013 dan 48,9 pada 2018) (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018). Sedangkan faktor determinan stunting di Negara berkembang diantaranya yaitu praktik pemberian makanan, budaya dan etnis, terlambat dalam inisiasi menyusui, kurangnya pengetahuan dan pemahaman ibu terkait menyusui dan diet bayi, praktik keluarga berencana, jarak antar kehamilan, vaksinasi, dan pendidikan orang tua (Aramico et al., 2020).

Menanggapi data di atas, Indonesia menetapkan bahwa stunting masuk ke dalam salah satu program prioritas nasional. Untuk mewujudkan target stunting 14% pada 2024, pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyiapkan sebuah strategi nasional yang bernama Strategi Nasional Percepatan Penanggulangan Stunting. Dalam strategi nasional tersebut, terdapat kendala yaitu kurangnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting. Edukasi yang dilakukan kepada kader kesehatan terkait stunting termasuk ke dalam strategi spesifik pengembangan kapasitas penyelenggara (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018).

Kader kesehatan atau yang disebut juga kader desa, kader posyandu atau kader PKK adalah perangkat desa yang dengan suka rela memberdayakan masyarakatnya sendiri demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagian besar dalam bidang kesehatan. Peran kader kesehatan dalam pencegahan stunting meliputi pemberian makanan tambahan, pembagian vitamin A, penyuluhan masalah gizi, kunjungan ke rumah, dan juga sebagai promotor kesehatan di masyarakat (Herlina, 2021). Pemberdayaan kader yang terstruktur dan komprehensif dapat mendukung terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui diseminasi/edukasi informasi kesehatan (Sianturi et al., 2013)(Rodiah et al., 2016).

Pelatihan yang dilakukan kepada kader seringkali terhambat karena mayoritas pekerjaan kader (76,7%) adalah ibu rumah tangga dimana 60% berpendidikan sekolah menengah atas dengan usia yang sangat variatif, yaitu rentang 35 hingga 60 tahun. Selain itu terdapat tiga factor yang menyebabkan kurangnya efektivitas edukasi yang dilakukan pada kader, yaitu kurangnya pelatihan yang diberikan kepada kader, kendala pembiayaan untuk melakukan pelatihan dan kurangnya bimbingan teknis yang diberikan kepada kader. Padahal pelatihan intensif yang diberikan kepada kader selain dapat meningkatkan skor keterampilan kader, juga dapat meningkatkan pengetahuan kader (Herlina, 2021).

Menurut Aryastami dan Tarigan dalam Rahayu Atikah, dkk. (2018) penanggulangan masalah *stunting* harus dimulai jauh sebelum seorang anak dilahirkan atau sejak periode 1000 HPK dan dari sejak ibu remaja untuk dapat memutus rantai *stunting* dalam kehidupan (Atikah, Rahayu, 2018). Masalah *stunting* di provinsi Aceh juga sedang menjadi sasaran bagi pemerintah untuk menurunkan angka *stunting*. Hasil Rikesdas tahun 2018 menunjukkan Aceh menduduki peringkat ketiga tertinggi prevalensi *stunting* pada anak balita di Indonesia yaitu 37,3 % dibandingkan rata rata nasional hanya 30,8%. Jika dilihat penyebaran prevalensi *stunting* berdasarkan kabupaten di Aceh menunjukkan hampir semua kabupaten mempunyai prevalensi *stunting* yang tinggi (>30%) (Peraturan Gubernur, 2019). Untuk menurunkan jumlah angka *stunting* tersebut pemerintah Aceh membuat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh. Dalam Peraturan Gubernur Aceh tersebut pada Pasal 4 menyatakan bahwa Ruang Lingkup Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi meliputi peran institusi Pemerintah, organisasi non

pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mewujudkan “Aceh Bebas *Stunting* Tahun 2024”.

Mengingat Indonesia yang memiliki tingkat stunting yang cukup tinggi, yaitu menduduki peringkat 108 dari 132 negara dengan prevalensi stunting terbesar di dunia, maka dalam penanganannya sangat di perlukan advokasi, kampanye, Edukasi dan diseminasi terkait stunting pada masyarakat. Terkhusus kabupaten di Aceh, yang menunjukkan hampir semua kabupaten mempunyai prevalensi *stunting* yang tinggi. Berkaitan dengan hal ini maka pada penelitian ini penulis mengambil judul **“PERAN**

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik (keseluruhan) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Sondak, Sandi Hesti, 2019). Pemilihan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah karena penulis ingin menggambarkan sejauh apakah peran dari Pemerintah Aceh Besar dalam pencegahan dan penanganan kasus *stunting* di Kabupaten Aceh Besar. sehingga nantinya penulis akan menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Kesehatan Aceh Besar (Puskesmas Pulo Aceh) dari 17 desa yang ada di Pulo Aceh angka Stunting setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2019 jumlah anak stunting 12 orang pada tahun 2020 sampai dengan 2022 berjumlah 44 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi

Dalam upaya mendukung program pemerintah demi mewujudkan generasi terbebas dari *stunting*, maka diperlukannya peran aktif pemerintah Kabupaten Aceh Besar beserta pihak yang terkait untuk bersama sama berperan dalam menangani kasus *stunting* ini. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa Ruang Lingkup Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi meliputi peran institusi Pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mewujudkan “Aceh Bebas *Stunting* Tahun 2022”.

Dalam pencegahan dan penanganan stunting tentunya diperlukannya komitmen dan kebijakan pemerintah di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan fokus penelitian

penulis yaitu pada pilar 1 Komitmen dan Kebijakan Pemerintah yang tepat. Isi dari pilar tersebut adalah terdiri dari:

1. Kebijakan Daerah

Dalam pencegahan dan penanganan *stunting* maka diperlukannya pembentukan kebijakan pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota yang dimaksudkan untuk mengatasi kasus *stunting* yang kini tengah menjadi prioritas bersama.

Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan kebijakan pencegahan dan penanganan stunting, di antaranya dengan ditetapkan pembentukan peraturan gubernur aceh Nomor 14 Tahun Aceh Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan stunting terpadu.

Adanya kebijakan ini dimaksudkan sebagai sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat serta masyarakat dalam menjalankan perannya masing-masing untuk pencegahan dan penanganan stunting.

Namun untuk saat ini, Pemkot Aceh masih menggunakan masih Perda Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019, karena Perda Bupati masih dalam tahap draf sehingga belum bisa digunakan. Oleh karena itu untuk saat ini pemerintah masih menggunakan Peraturan Gubernur sebagai pedoman pemerintah dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.

2. Komitmen bersama oleh pemerintah Daerah, Masyarakat, pemangku kepentingan

Untuk mendukung jalannya kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya maka dibutuhkan bentuk kerjasama atau komitmen bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak yang terkait di dalam pencegahan dan penanganan *stunting* tersebut. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu tanda kesepakatan bersama dengan pihak yang terkait dengan melakukan penandatanganan di dalamnya.

3. Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan

Stunting (RAD-Stunting).

Untuk mengurangi kasus *stunting*, pemerintah dan pihak terkait di dalamnya mengembangkan rencana aksi daerah. Penyusunan rencana aksi daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan agar dapat dilaksanakan

sesuai dengan rencana sebelumnya untuk pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Bentuk dari rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan *stunting* adalah seperti dibentuknya Rumoh Gizi Gampong.

Terciptanya Rumoh Gizi Gampong (RGG) ini merupakan wadah sosialisasi dan pemberian pelayanan gizi serta pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) kepada masyarakat yang mengalami masalah gizi.

Dengan adanya rumah gizi gampong, diharapkan dapat berkontribusi dalam percepatan penurunan kasus *stunting*. Namun saat ini rumah gizi gampong yang ada di Kabupaten Aceh Besar saat ini masih dikatakan terbatas dalam artian baru dua Kecamatan yang memiliki rumah gizi gampong seperti Kecamatan Montasik dan Kecamatan Darul Imarah. Sedangkan beberapa yang lain belum memiliki Rumoh Gizi Gampong atau masih dalam tahap rencana. Oleh karena itu diharapkan pemerintah maupun kepala desa terkait untuk mempercepat proses pembangunan rumah gizi gampong di setiap gampong yang ada di Kecamatan Aceh Besar.

Selanjutnya, rencana aksi daerah yang dilaksanakan pemerintah adalah membentuk tim pendampingan keluarga (TPK). Pembentukan tim pendampingan keluarga merupakan program pemerintah yang bertugas turun langsung ke lapangan di masyarakat. Tim ini terdiri dari tiga orang yaitu bidan desa, Pelaksana Pemberdayaan Kesejahteraan dan kader Keluarga Berencana.

Tim ini selanjutnya akan mengunjungi keluarga setiap bulan untuk pendidikan atau pendampingan kepada keluarga dan yang akan menikah sebagai bentuk pencegahan *stunting*. Karena mencegah retardasi pertumbuhan tidak hanya di awal kehamilan, tetapi harus dihindari selama masa remaja atau oleh pasangan calon suami istri.

4. Penghargaan bagi masyarakat yang peduli terhadap Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah pertumbuhan yang saat ini menjadi prioritas bersama, diharapkan masyarakat untuk berpartisipasi pencegahan dan penanganan stunting tersebut. Oleh karena itu, maka pemerintah akan memberikan semacam penghargaan guna membangkitkan kepedulian atau sebagai motivasi bagi masyarakat lainnya agar mau bekerjasama dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Akan tetapi pemberian penghargaan bagi masyarakat yang peduli terhadap pencegahan dan penanganan stunting, saat ini belum dilakukan. Oleh karena itu sangat penting pemberian penghargaan dalam hal pencegahan dan pengobatan stunting, karena dengan pemberian penghargaan ini akan semakin meningkatkan semangat dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan stunting ini. Selain itu, dengan menerima penghargaan ini akan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting yang mana sebagai salah satu kewajiban kita juga untuk menanggulangi kasus stunting ini.

B. Hambatan Pemerintah Aceh Besar dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi.

1. Partisipasi masyarakat

Salah satu hambatan dalam pencegahan dan penanganan stunting yaitu adalah masih rendahnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri baik dalam kegiatan posyandu maupun pada kegiatan rumah gizi gampong. Oleh karena itu untuk memperoleh data terkait permasalahan gizi di lapangan terutama stunting agak sulit didapatkan karena kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk itu diperlukannya himbauan pemerintah maupun pemerintah di tingkat desa agar dapat membangun semangat para orang tua untuk mau bekerjasama dalam memberantas kasus stunting ini demi mewujudkan generasi sumber daya manusia unggul di masa yang akan datang.

2. Pemahaman masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat juga dihadapi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan stunting. Salah satu pemahaman masyarakat yang lemah atau pengetahuan yang orang tua tidak mengerti bagaimana memberikan nutrisi pada anaknya. Sehingga kurangnya suplai makanan bergizi menyebabkan anak mengalami masalah gizi.

Menurut hasil penelitian, hambatan di lapangan adalah kurangnya pemahaman orang tua dalam memberikan makanan bergizi kepada anak,

sehingga di masyarakat lain masih belum sepenuhnya menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, pengetahuan ibu yang rendah bukan pada tingkat kebiasaan makan, tetapi juga ada orang yang menganggap bahwa anak yang bertubuh pendek adalah normal, padahal jika pertumbuhan terhambat tidak dicegah atau diobati secepatnya, akan berdampak pada anak, termasuk fungsi otak dan kondisi tertentu yang mempengaruhi anak.

Untuk itu sosialisasi lanjutan sangat dibutuhkan saat ini agar ibu hamil lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan dari awal kehamilan sampai kandungan 9 bulan. Sosialisasi ini diharapkan mendorong ibu hamil untuk mau menerapkan pola hidup sehat selama kehamilan untuk mencegah masalah gizi pada anak dan risiko keterlambatan pertumbuhan (*stunting*).

3.Faktor Ekonomi Masyarakat

Situasi keuangan yang tidak menguntungkan ini dapat menimbulkan masalah dan risiko *stunting*. Pengaruh ekonomi terhadap *stunting* dijelaskan oleh alifariki yaitu bahwa dominasi lambat pertumbuhan pada anak-anak terjadi pada mereka yang terkena dampak ekonomi, sehingga menyebabkan kelaparan yang berkepanjangan. Dan hasil riset membuktikan bahwa dominannya anak *stunting* ditemukan pada keluarga yang terdampak ekonomi (Alifariki, 2020). Jadi faktor ekonomi salah satunya tidak bisa memberikan nutrisi yang baik pada anak, terutama saat hamil. Apalagi ditambah dengan mewabahnya kasus Covid-19, tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup seperti biasanya. Sehingga dengan penghasilan yang tidak mencukupi, hal ini membuat para ibu selama hamil hanya mengonsumsi secukupnya saja.

4.Faktor Budaya atau Kebiasaan

Budaya atau adat adalah sesuatu yang dilakukan secara permanen oleh masyarakat. Kebiasaan yang dimaksud disini adalah dimana masih banyak orang yang “satu anak cukup makan beberapa jenis saja” sehingga perilaku ini dianggap *stunting* karena dalam hal ini masyarakat belum sepenuhnya mengetahui bagaimana cara memberikan makanan bergizi kepada anak.

Dalam pemenuhan gizi anak, peran orang tua disini sangat penting, khususnya dengan memperhatikan makanan yang akan diberikan pada anak nantinya.

Selain itu, pada masa periode emas, dari umur 1-2 tahun merupakan masa pertumbuhan anak, sehingga harus benar benar memperhatikan gizi dan nutrisi yang baik.

5.Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting bagi sebuah kebijakan. Sumber daya manusia yang memadai dapat mengimplementasikan secara optimal. Begitu pula sebaliknya jika dalam implementasi kebijakan masih ada SDM yang belum memadai maka akan menjadi kendala. Sumber daya manusia khususnya pada kader membutuhkan tambahan pelatihan dan pengawasan agar tercapai hasil pengukuran yang maksimal dalam menentukan status gizi balita. Agar data pengukuran yang dilakukan oleh valid atau dalam artinya tidak ada kesalahan dalam pengukuran yang dilakukan.

PERAN PEMERINTAH ACEH BESAR DALAM PENCEGAHAN GENERASI STUNTING DI KECAMATAN PULO ACEH KABUPATEN ACEH BESAR

Peran pemerintah Aceh Besar dalam pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi yaitu yang pertama dalam hal pembentukan kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting*. akan tetapi hal tersebut belum optimal khususnya kebijakan *stunting* untuk Kabupaten Aceh Besar yang saat ini masih menggunakan peraturan Gubernur Aceh (pergub). Kedua adalah membuat komitmen bersama dengan pemangku kepentingan terkait pencegahan dan penanganan *stunting*. ketiga, pembuat rencana aksi daerah yaitu dengan membentuk rumah gizi gampong di seluruh gampong (Desa) di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Besar. Tetapi saat ini baru ada dua kecamatan yang sudah membangun rumah gizi gampong tersebut. Selain itu rencana aksi daerah lainnya adalah dengan membentuk tim pendamping keluarga (TPK), tetapi saat ini para tim tersebut belum dapat turun langsung kelapangan di karenakan masih mengikuti bimbingan teknis. Keempat, memberikan penghargaan kepada masyarakat yang peduli terhadap *stunting*, namun saat ini penghargaan tersebut belum dilakukan. adapun hambatan pemerintah Aceh Besar dalam pencegahan dan penanganan *stunting* adalah seperti kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan posyandu maupun ikut serta pada kegiatan rumah gizi gampong. pemahaman masyarakat yang masih minim terhadap *stunting*, Faktor budaya atau kebiasaan yang ada di masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi kader yang masih minim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Universitas Kesehatan di Indonesia khususnya Jurusan gizi yang telah memfasilitasi penulis untuk menyelesaikan penulisan artikel ini. Dan terima kasih juga kepada Pemerintahan Aceh Besar yang sudah memberikan data *Stunting* kabupaten Aceh Besar, Khususnya di kecamatan Pulo Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, Rahayu, dkk. (2018). *Stunting dan Upaya Pencegahannya* (Hadianor (ed.); 1st ed.). CV Mine.
- Alifariki La Ode. (2020). *Gizi dan Anak Stunting* (S. Heriviyatno Julika (ed.)). CV . Fawwaz Mediapipta.
- Ketut, E. N. (2020). Literatur Review: Program Mother Smart Grounding (Msg) Dalam Penanganan Gizi Stunting. *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi*, 8(1), 10–17.
- Kartika, M. (2020). (*Republika. co.id.Kemiskinan jadi faktor penyebab stunting ,Diakses pada 07 Maret 2021*). REPUBLIKA.CO.ID.
- Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting, (2019).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang.
- Setiawan, B. (2018). *Faktor-faktor Penyebab Stunting pada Anak Usia Dini* (E. Yulaelawati (ed.)). Yayasan Rumah Komunitas Kreatif.
- Sondak, Sandi Hesti, dkk. (2019). Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 671–680.
- Trihono, D. (2015). *Pendek (Stunting) di Indonesia, Masalah dan Solusinya* (M. Sudomo (ed.)). Lembaga Penerbit Balitbangkes.
- Aramico, B., Huriyati, E., & Dewi, F. S. T. (2020). *Determinant Factors of Stunting and Effectiveness of Nutrition, Information, Education Interventions to Prevent Stunting in the First 1000 Days of Life: A Systematic Review*. <https://doi.org/10.26911/the7thicph.03.15>
- CEBM. (n.d.). *Critical Appraisal Tools*. CEBM. Retrieved February 12, 2022, from <https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/ebm-tools/critical-appraisal-tools>
- Daerah Aceh Besar, Pukesmas Pulo Aceh, *Data Stunting*, Kabupaten Aceh Besar